



Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang



RENJA

2024

Rencana Kerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dapat terselesaikan.

Terbitnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsihnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng, **2023**
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

AHMAD, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19710604 199803 1 019





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	26
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	33
Penutup	33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2021 s/d Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang	20
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	25
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);



19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Adapun tujuan dari Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;



4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu. Bab ini evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, serta program dan kegiatan.

Bab IV Penutup. Bab ini memuat penutup.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024.

Anggaran belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 7.581.943.000,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 2.842.580.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.739.363.000,- sedangkan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.769.054.791,- (76,09%) yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 2.737.022.460,- (96,16%) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 3.032.032.331,- (63,98%) dari rencana. Dengan demikian, jika Realisasi Pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 73.657.500,- maka terjadi defisit sebesar (Rp. 5.695.397.291).

Adapun keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, bahan evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara kelembagaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan SKPD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis Lingkungan Strategis yaitu Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembang oleh lembaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD, memerlukan :

2.1.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang dapat membawa pengaruh terhadap Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Emviromental Input. Instrumental Input berkenaan dengan instrument yang berpengaruh langsung secara internal dan dapat berupa kelemahan yang perlu diberikan solusi yang tepat sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Enveromental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta emviromental input.

2.1.2. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu diupayakan secara maksimal sehingga mampu dikendalikan dalam optimalisasi pencapaian kinerja dan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERAKNGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023	
							Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian												
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	100
3.30	01.2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	100
3.30	01.2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	100
3.30	01.2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
3.30	01.2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	5 Dokumen	83
3.30	01.2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
3.30	01.2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	5 Dokumen	83
3.30	01.2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	10 Dokumen	83
3.30	01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	100
3.30	01.2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	100
3.30	01.2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	200 %	100 %	100 %	0 %	0	100 %	200 %	100
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	24 Bulan	100
3.30	01.2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300 %	100 %	100 %	72 %	72	100 %	272 %	91

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023	
							Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	01.2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	80 Buah	20 Buah	20 Buah	5 Buah	25	20 Buah	45 Buah	56
3.30	01.2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	65 Eksamplar	30 Eksamplar	30 Eksamplar	0 Eksamplar	0	30 Eksamplar	60 Eksamplar	92
3.30	01.2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	330 Kali	110 Kali	110 Kali	110 Kali	100	110 Kali	330 Kali	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	200 %	0 %	100 %	0 %	-	100 %	100 %	50
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	20 Buah	0 Buah	2 Buah	0 Buah	0	10 Buah	10 Buah	50
3.30	01.2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	99 %	99	100 %	299 %	100
3.30	01.2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen yang Bermaterai	336 lembar	177 lembar	68 lembar	68 lembar	100	68 lembar	313 lembar	93
3.30	01.2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
3.30	01.2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	11 bulan	92	12 bulan	35 bulan	97
3.30	01.2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	100
3.30	01.2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	100
3.30	01.2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	54 unit	5 unit	18 unit	18 unit	100	18 unit	41 unit	76
3.30	01.2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	67
3.30	01.2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	36 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0	12 unit	14 unit	39

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023	
							Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	300 %	90	100 %	10 %	10	100 %	200 %	67
3.30	02.2	01	Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	300 %	90	100 %	10 %	10	100 %	200 %	67
3.30	02.2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengawasan Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha	300 Unit	90 Unit	100 Unit	10 Unit	10	110 Unit	210 Unit	70
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	18.75 %	6.25 %	6.25 %	6.25 %	100	6.25 %	18.75 %	100
3.30	03.2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.75 %	6.25 %	6.25 %	6.25 %	100	6.25 %	18.75 %	100
3.30	03.2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Rakyat yang Dibangun dan Direvitalisasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	100
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	300 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	200 %	67
3.30	04.2	01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	3 Kegiatan	- Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	67
3.30	04.2.01	01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Operasi Pasar pada Waktu Tertentu	3 Kegiatan	- Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	67
3.30	04.2	02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal	144 Laporan	48 Laporan	- Laporan	- Laporan	0	48 Laporan	96 Laporan	67
3.30	04.2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok bahan pokok dipasaran	144 Laporan	48 Laporan	- Laporan	- Laporan	0	48 Laporan	96 Laporan	67

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023	
							Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	04.2	03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi	36 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	67
3.30	04.2.03	01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Secara Berkala Penyaluran Pupuk / Pestisida Bersubsidi di Tingkat Distributor dan Kios	36 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	67
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	292.5 %	49.82 %	97.50 %	55.28 %	100	100 %	205 %	70
3.30	06.2	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	292.5 %	49.82 %	97.50 %	55.28 %	100	100 %	205 %	70
3.30	06.2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang	11,700 Alat UTTP	1,740 Alat UTTP	3,900 Alat UTTP	2,156 Alat UTTP	55	4,000 Alat UTTP	7,896 Alat UTTP	67
3.30	06.2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP diawasi yang sesuai dengan standar ukuran	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	100
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	90.47 %	7.14 %	0.00 %	0 %	0	50 %	57.14 %	63
3.30	07.2	01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	90.47 %	7.14 %	0.00 %	0 %	0	50 %	57.14 %	63
3.30	07.2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem informasi usaha Perdagangan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	- Kegiatan	- Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33
			BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	51.09 %	31.91 %	20.28 %	0.54 %	2.66	20.52 %	53 %	104
3.31	02.2	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	51.09 %	31.91 %	20.28 %	0.54 %	2.66	20.52 %	53 %	104
3.31	02.2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pemberian Fasilitas Akses Perbankan bagi IKM	50 IKM	IKM	- IKM	- IKM	0	25 IKM	25 IKM	50
				Jumlah Pengembangan Jaringan IKM dalam Bentuk Pembinaan, Promosi, Pameran, Rakerda, Rakerwil, Dekranasda Award	7 Kali Pameran	50 Pelaku Pengrajin dibina	1 Pelatihan	Kali Pameran	0	3 Kali Pameran	3 Kali Pameran	43

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2023	
							Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.31	02.2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pengembangan Sentra IKM	4 Paket	Paket	0 Paket	0 Paket	0	3	3 Paket	75
				Jumlah Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	153 Kelompok IKM	29 Kelompok IKM	8 Kelompok IKM	3 Kelompok IKM	38	65 Kelompok IKM	68 Kelompok IKM	44
				Jumlah dokumen pola pengembangan sentra industri	1 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				Jumlah dokumen DED sentra industri	2 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50
				Jumlah Peralatan Sentra IKM	2 Paket	Paket	0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	1 Paket	50
				Luas Lahan Pengembangan Sentra Industri	2 Ha	Ha	0 Ha	0 Ha	0	1 Ha	1 Ha	50
3.31	02.2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Pengrajin Industri yang Dibina dan Dibimbing	6 Kelompok	Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0	3 Kelompok	3 Kelompok	50
				Jumlah Pelatihan Teknologi Industri	60 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0	30 Orang	30 Orang	50
3.31	02.2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah kelompok IKM yang dibina	3 Kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	0	1 Kali	1 Kali	33
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan IKM	3 %	0.99 %	1 %	0.95 %	95	1 %	3 %	98
3.31	04.2	01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri	3 %	0.99 %	1 %	0.95 %	95	1 %	3 %	98
3.31	04.2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Sarana Informasi IKM yang Dapat Diakses Pemangku Kepentingan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	67



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara kelembagaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan SKPD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis Lingkungan Strategis yaitu Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembang oleh lembaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD, memerlukan :

2.1.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang dapat membawa pengaruh terhadap Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Emviromental Input. Instrumental Input berkenaan dengan instrument yang berpengaruh langsung secara internal dan dapat berupa kelemahan yang perlu diberikan solusi yang tepat sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Enveromental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta emviromental input.

2.1.2. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu diupayakan secara maksimal sehingga mampu dikendalikan dalam optimalisasi pencapaian kinerja dan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan



Perindustrian saat ini meskipun masih jauh dari memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat diatasi dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan bagian bentuk Peraturan Perundang-undangan yang secara eksternal memiliki pengaruh signifikan serta membawa dampak yang luas terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Kemetrolgion serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan.

Secara umum analisa kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Standar Nasional		Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Bidang Sekretariat</u>													
	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat			Dokumen	3	3	3	3	3	0	3	3	3	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	100	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Bulan/ Orang	33/12	33/12	33/12	33/12	33/12	0	33/12	33/12	33/12	
	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	100	100	100	100	100	0	100	100	100	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat			Laporan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	0	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	0	12	12	12	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Satuan		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100	100	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Unit	18	18	18	18	18	0	18	18	18	
	Bidang Perdagangan													
	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya			Persen	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	0	6.2	6.2	6.2	
	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan			Persen	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	0	6.2	6.2	6.2	
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			Unit	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya			Persen	0	100	100	0	100	0	100	100	100	
	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar			Kegiatan	0	1	1	0	1	0	1	1	1	
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Kegiatan	0	1	1	0	1	0	1	1	1	
	Persentase Alat-Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)			Persen	95	97.5	100	49,82	55,28	0	50	75	100	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Satuan		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan			Persen	95	97.5	100	49,82	55,28	0	50	75	100	
	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang			Alat UTTP	3800	3900	4000	1740	2156	0	2000	2250	2500	
	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi legal yang dibina			Orang	50	50	50	50	50	0	50	50	50	
	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri			Persen	0	0	0	0	0	0	22,22	33,33	44,44	
	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri			Persen	0	0	0	0	0	0	22,22	33,33	44,44	
	Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Orang	0	0	0	0	0	0	20	30	40	
	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan			Persen	20.24	20.28	20.52	31.91	0.54	0	20	20	20	
	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri			Persen	20.04	20.28	20.5	31.91	0.54	0	20	20	20	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Dokumen	1	1	1	1	0	0	1	1	1	

No.	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Standar Nasional		Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Dokumen	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Dokumen	1	1	1	1	0	0	1	1	1	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Belum tersedianya database usaha perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang,
2. Kecenderungan masyarakat menggunakan produk luar sehingga perlunya peningkatan keinginan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri,
3. Perlunya peningkatan SDM IKM dan kelompok masyarakat,
4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar informasi tentang pelatihan IKM semakin meluas,
5. Tingkat Kesadaran masyarakat tentang metrologi legal masih minim, dan
6. Kurangnya SDM kemetrologian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan di Indoneia dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan terjadinya proses perencanaan tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,086,597,949	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,086,597,949	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	5,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	5,000,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2,747,909,949	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2,747,909,949	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / 12 bulan	2,747,909,949	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang /12 bulan	2,747,909,949	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	50,000,000	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50,000,000	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	232,760,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	232,760,000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Laporan	1,400,000	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Laporan	1,400,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56,760,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56,760,000	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174,600,000	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	50,928,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	50,928,000	
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36,400,000	
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	14,528,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	14,528,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,110,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,110,000,000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Sidrap	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	6,2 Persen	2,000,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Sidrap	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	6,2 Persen	3,000,000,000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6,2 Persen	2,000,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6,2 Persen	3,000,000,000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	2,000,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3,000,000,000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Sidrap	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 Persen	50,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Sidrap	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 Persen	50,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sidrap	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	1 Kegiatan	50,000,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sidrap	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	1 Kegiatan	50,000,000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 kegiatan	50,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 kegiatan	50,000,000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Sidrap	Persentase Alat-Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persen	10,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Sidrap	Persentase Alat-Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persen	10,000,000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Sidrap	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	persen	10,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Sidrap	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	persen	10,000,000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Sidrap	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	alat UTTP	5,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Sidrap	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	alat UTTP	5,000,000	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Sidrap	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi legal yang dibina	Orang	5,000,000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Sidrap	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi legal yang dibina	Orang	5,000,000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Sidrap	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	22,22 Persen	50,000,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Sidrap	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	22,22 Persen	50,000,000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Sidrap	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	22,22 Persen	50,000,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Sidrap	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	22,22 Persen	50,000,000	
3.30.07.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Kegiatan	50,000,000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Kegiatan	50,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3-31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				600,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				7,200,000,000	
3-31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Sidrap	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	20 Persen	600,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Sidrap	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	20 Persen	7,200,000,000	
3-31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	20 Persen	600,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	20 Persen	7,200,000,000	
3-31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	100,000,000	
3-31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 DOKumen	300,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 DOKumen	5,100,000,000	
3-31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		2,000,000,000
JUMLAH					5,796,597,949					13,396,597,949	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya terkait dengan pengembangan perdagangan, perindustrian, dan kemetrolagian, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Koefisien	Anggaran	Alamat
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				<u>900,000,000</u>		
USULAN LANGSUNG (ASPIRASI)				<u>825,000,000</u>		
1	A. MUKTI ALI, SE.,M.Adm.Pemb		Pelatihan Keterampilan Pengolahan	4 Dokumen	75,000,000	(Dusun 1,2,3,4 Desa Lagading (Sasaran Lembaga Tim Penggerak PKK Desa Lagading), Pitu Riase)
2	ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH. M.Si		Pengadaan Alat Pengolahan Mete	3 Dokumen	300,000,000	(Dsn I Kamp. Baru, dsn II Pabbaresseng dan dsn III Kamirie, Kab. Sidenreng Rappang (Masyarakat), Watang Pulu)
3	ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH. M.Si		Pengadaan Alat Pengolahan Mete	3 Dokumen	300,000,000	(Dusun I paosadae, dusun II buae, dan dusun III talumae, Kab. Sidenreng Rappang (masyarakat), Watang Pulu)
4	M. FASRAH NUR, S.STP, M.Si		Pelatihan Keterampilan Pengolahan	1 Dokumen	75,000,000	(Pelatihan keterampilan pengolahan gula semut (Jl. Andi Cammi Dusun Maddenra), Kulo)
5	BUSTAMAN, S.Sos		Pelatihan Keterampilan Pengolahan	1 Dokumen	75,000,000	(Desa Tonronge (Tokoh Perempuan), Baranti)
USULAN RESES / POKOK PIKIRAN				<u>75,000,000</u>		
6	H. HAERUDDIN AM.	Pengadaan Alat Pertukangan Kayu	Pelatihan Keterampilan Pengolahan	1 Dokumen	75,000,000	di Kelurahan Wala dan Lakessi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terbagi menjadi 3 bagian antara lain: Urusan Perindustrian, Pengembangan Perdagangan, dan Kemetrolagian yang merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara Kepulauan Republik Indonesia.

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Program Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengalokasikan sarana. Untuk Program Kementerian Perindustrian mengalokasikan dana Pembangunan Sentra IKM yang alokasi dananya dari DAK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja	Predikat Nilai SAKIP
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian	Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Industri



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan sarana distribusi perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota
 - a. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen pasar rakyat
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - a. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang
 - b. Pengawasan/ penyuluhan metrologi legal



5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
 - a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
 - c. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,086,597,949.00				3,217,624,948
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 persen	5,000,000	APBD		100 persen	5,050,000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	3 dokumen	3,000,000	APBD		3 dokumen	3,030,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	2,000,000	APBD		1 dokumen	2,020,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 persen	2,747,909,949	APBD		100 persen	2,775,389,048
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	33 Orang / 12 bulan	2,747,909,949	APBD		33 Orang / 12 bulan	2,775,389,048
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 Persen	50,000,000	APBD		100 Persen	50,500,000
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	100 Laporan	50,000,000	APBD		100 Laporan	50,500,000
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 persen	232,760,000	APBD		100 persen	330,285,900
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	1,400,000	APBD		1 Laporan	2,000,000
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	56,760,000	APBD		12 Laporan	56,760,000

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	174,600,000	APBD		12 Laporan	271,525,900
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100 persen	50,928,000	APBD		100 persen	56,400,000
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	1 unit	36,400,000	APBD		1 unit	36,400,000
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkajene Sidenreng	18 unit	14,528,000	APBD		18 unit	20,000,000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,110,000,000				3,165,600,000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	Kab. Sidrap	6,2 Persen	2,000,000,000	APBD		6,2 Persen	3,030,000,000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan	Kab. Sidrap	6,2 Persen	2,000,000,000	APBD		6,2 Persen	3,030,000,000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	1 unit	2,000,000,000	APBD		1 unit	3,030,000,000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kab. Sidrap	100 Persen	50,000,000	APBD		100 Persen	50,500,000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	Kab. Sidrap	1 Kegiatan	50,000,000	APBD		1 Kegiatan	50,500,000

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sidrap	1 kegiatan	50,000,000	APBD		1 kegiatan	50,500,000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Kab. Sidrap	Persen	10,000,000	APBD		Persen	10,100,000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	Kab. Sidrap	persen	10,000,000	APBD		persen	10,100,000
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Kab. Sidrap	alat UTTP	5,000,000	APBD		alat UTTP	5,050,000
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi legal yang dibina	Kab. Sidrap	Orang	5,000,000	APBD		Orang	5,050,000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Sidrap	22,22 Persen	50,000,000	APBD		33,33 Persen	75,000,000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Kab. Sidrap	22,22 Persen	50,000,000	APBD		33,33 Persen	75,000,000
3.30.07.2.01.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Sidrap	1 Kegiatan	50,000,000	APBD		1 Kegiatan	75,000,000

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3-31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				600,000,000				7,200,000,000
3-31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	Kab. Sidrap	20 Persen	600,000,000	APBD		20 Persen	7,200,000,000
3-31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	Kab. Sidrap	20 Persen	600,000,000	APBD		20 Persen	7,200,000,000
3-31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sidrap	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
3-31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sidrap	1 DOKumen	300,000,000	APBD		1 DOKumen	5,100,000,000
3-31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	2,000,000,000
JUMLAH					5,796,597,949				13,583,224,948



BAB IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2024 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng,

2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

AHMAD, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710604 199803 1 019